

## DAFTAR PUSTAKA

### 1. Buku

- Murad, Rusmadi 1997, *Administrasi Pertanahan : Pelaksanaannya dalam Praktek*, Bandung, Mandar Maju
- Lubis, M. Yamin dan Lubis, Abdul Rahim, 2010, *Hukum Pendaftaran Tanah*, Jakarta, Mandar Maju
- Lubis, M. Yamin, *Jawaban-jawaban Atas Pertanyaan dalam Komentar atas Undang-undang Pokok Agraria*, Medan, Pusat Studi Hukum Agraria Fakultas Hukum USU
- Waskito dan Arnowo, Hadi, 2019, *Penyelenggaraan Pendaftaran Tanah di Indonesia*, Jakarta, Kencana
- Parlindungan, A.P., 1999, *Pendaftaran Tanah di Indonesia*, Bandung, Mandar Maju
- Harsono, Boedi, 1997, *Hukum Agraria Indonesia: Sejarah Pemebentukan Undang-Undang Pokok Agraria, Isi dan Pelaksanaannya*, Jakarta, Djambatan
- Hermanses, R., 1996, *Pendaftaran Tanah di Indonesia*, Jakarta, Pradnya Paramita
- Soemardjono, Maria, 1982, *Puspita Seragkum: Aneka Masalah Hukum Agraria*, Yogyakarta, Andi Offset
- Hermanses, R., 1981, *Pendaftaran Tanah di Indonesia*, Jakarta, Direktorat Jenderal Agraria

- Guntur, I Gusti Nyoman, 2014, *Pendaftaran Tanah*, Yogyakarta, Kementrian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional Sekolah Tinggi Pertanahan Nasional
- Hutagalung, Arie S., 2005, *Tebaran pemikiran Seputar Masalah Hukum Tanah*, Jakarta, Lembaga Pemberdayaan Hukum Indonesia
- Bachtiar Effendi, 1983, *Pendaftaran Tanah di Indonesia*, Bandung, Alumni
- J.B. Daliyo dkk., 2001, *Hukum Agraria I*, Jakarta Prehallindo
- Setiawan, I Ketut Oka, 2019, *Hukum Pendaftaran Tanah dan Hak Tanggungan*, Jakarta, Sinar Grafika
- Sutedi, Adrian, 2012, *Sertifikat Hak Atas Tanah*, Jakarta, Sinar Grafika
- Soerjono Soekanto, Sri Madmudji, 2004, *Penelitian Hukum Normatif*, Jakarta, Raja Grafindo Persada
- Marzuki, Peter Mahmud, 2011, *Penelitian Hukum*, Jakarta, Kencana Prenada Media Group
- Soekanto, Soerjono, 2015, *Pengantar Penelitian Hukum*, Jakarta, Universitas Indonesia
- Ali, Zainuddin, 2016, *Metode Penelitian Hukum*, Jakarta, Sinar Grafika
- Diantha, I Made Pasek, 2016, *Metodologi penelitian hukum*.
- Dewata, Mukti Fajar Nur dan Achmad, Yulianto, 2015, *Dualisme Penelitian Hukum Normatif & Empiris*, Yogyakarta, Pustaka Pelajar
- Fahey, Elaine, 2018, *Institutionalisation beyond the Nation State: Transatlantic Relations: Data, Privacy and Trade Law (Studies in European Economic Law and Regulation, 10)*, Springer

Djafar, Wahyudi, dkk., 2018, *Hak Atas Penghapusan Informasi di Indonesia: Orisinalitas dan tantangan dan penerapannya*, Jakarta, LBG Pers

## **2. Peraturan Perundang-undangan**

- a. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945
- b. Undang-Undang Nomor 5 tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-pokok Agraria (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1960 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2043)
- c. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3886)
- d. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4843) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2016 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 251, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5952)
- e. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 124, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4674),

sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 232, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5475)

f. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2021 tentang Hak Pengelolaan, Hak Atas Tanah, Satuan Rumah Susun, dan Pendaftaran Tanah (Lembaran Negara Tahun 1997 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3696)

g. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Sistem dan Transaksi Elektronik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 185)

h. Peraturan Menteri ATR/BPN Nomor 1 Tahun 2021 tentang Sertipikat Elektronik (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 12)

i. Peraturan Menteri Agraria/Kepala BPN Nomor 3 Tahun 1997 tentang Ketentuan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah, sebagaimana diubah dengan Peraturan Kepala BPN Nomor 8 Tahun 2012 dan Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala BPN Nomor 7 Tahun 2019

### 3. Hasil Penelitian

- a. Silvia Diana, 2016, *Pengecekan Sertipikat dalam Pembuatan Akta Jual Beli Tanah untuk Mencegah Terjadinya Sengketa Pertanahan di Kota Pekanbaru*, Thesis, Universitas Andalas, Pekanbaru
- b. Fitaya Khotijah, 2015, *Kesadaran Hukum Masyarakat dalam Pendaftaran Tanah di Desa Pekuncen Kecamatan Pegandon Kabupaten Kendal*, Skripsi, Semarang
- c. Siti Hardiyanti Harahap, 2011, *Sistem Pendaftaran Tanah yang Belum Bersertifikasi untuk Memperoleh Hak Kebendaan Atas Tanah di Desa Tanjung Sati Kecamatan Batangkuis*, Skripsi, Medan
- d. Denny Andreas Sutopo, 2016, *Kekuatan Hukum Sertifikat Hak Atas Tanah Dikaitkan dengan Kepastian Hukum dalam Pendaftaran Tanah*, Skripsi, Universitas Lampung, Bandar Lampung

### 4. Jurnal

- a. Erma Priliasari, 2019, "*Pentingnya Perlindungan Data Pribadi dalam Transaksi Pinjaman Online*"
- b. Elko Lucky Mamesah, 2012, *Kegunaan Pendaftaran Tanah Bagi Pemilik Tanah*, Hasil Karya Ilmiah Kementrian Pendidikan dan Kebudayaan, Manado
- c. Paolo Guarda, 2008, *Data Protection, Information Privacy, and Security Measures: an essay on the European and the Italian Legal Framework*

- d. Thomas D.C. Bennett, 2019, *Triangulating Intrusion in Privacy Law*, Oxford Journal of Legal Studies
- e. Benjamin G, Waters, 2018-2019, *An International Right To Privacy: Israeli intelligence Collection In The Occupied Palestinian Territories*, Georgetown Journal of International Law Volume 50